

Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2019

¹Salsabila Fitria, ² Asnita Frida Sebayang, ³ Aan Julia

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

1Salsabilafitria99@gmail.com, 2 fridaasnita@gmail.com, 3Mutiah_aan@yahoo.com

Abstract— The Village Fund is a source of finance originating from the State Budget (APBN) which is budgeted annually and given to each village as a source of village income. With this source of income, it is hoped that the village will be able to influence the reduction in the level of poverty in the community. Poverty is one of the problems still faced in developing countries, one of which is Indonesia. So to reduce poverty in villages, the government made a new policy as an effort to alleviate poverty, namely the Village Fund. Village funds are given to every village in every province in Indonesia. The purpose of the study was to determine how the performance of village funds on poverty alleviation in 33 provinces in Indonesia in the period of 5 years, namely 2015-2019. This research uses quantitative methods. The data used in this research is panel data (pooled data), which is a combination of time series data and cross section data. The data used are data from 33 provinces in Indonesia from 2015 to 2019. The results of this study show that the effect of village funds has a positive effect on reducing the poverty rate in Indonesia but has not yet shown significant results. Village funds provided by the government to villages in Indonesia have provided positive results for village development, both physical and non-physical infrastructure. However, even though it has shown a good influence on its users, village funds have not contributed significantly to reducing poverty in Indonesia. This is because the management of village funds has not been able to improve overall community empowerment and there are still many people who have not contributed to village funds. In addition, village funds focus more on developing village infrastructure than on empowering the economy of the community in the village.

Keywords— Village Fund, Poverty, Pooled Least Square

Abstrak— Dana Desa merupakan sumber keuangan yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dianggarkan setiap tahun dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya sumber pendapatan diharapkan desa akan mampu mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi di negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Maka untuk mengurangi kemiskinan di desa pemerintah membuat kebijakan baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan yaitu Dana Desa. Dana desa diberikan kepada setiap desa di setiap Provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja dana desa terhadap pengentasan tingkat kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data), yaitu kombinasi antara data time series dan data cross section. data yang digunakan adalah

data dari 33 Provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh dana desa berpengaruh secara positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tetapi belum masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia sudah memberikan hasil yang positif untuk pembangunan desa, baik itu prasarana fisik maupun non fisik. Tetapi, walaupun sudah menunjukkan pengaruh yang baik dalam penggunaannya, dana desa belum berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan pengelolaan dana desa belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dan masih banyak masyarakat yang belum berkontribusi terkait dana desa. Selain itu dana desa lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur desa dibandingkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.

Kata Kunci— Dana Desa, Kemiskinan, Pooled Least Square

I. PENDAHULUAN

Masalah yang sering di hadapi dalam proses pembangunan ekonomi yaitu seperti kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang selalu dihadapi di tiap negara, terutama di negara yang sedang berkembang. Salah satu negara yang sedang berkembang dan masih menghadapi masalah kemiskinan ialah Indonesia. Indonesia masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dalam waktu dekat. Hal tersebut terjadi karena penurunan kemiskinan yang kurang membahagiakan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat rumit dan mempunyai sifat negatif dan berdampak buruk untuk kemajuan di suatu daerah, maka dari itu masalah kemiskinan ini harus dapat diberantas sampai habis (Wirawan & Arka, 2013). Dengan masih terdapatnya penduduk miskin di beberapa wilayah di Indonesia artinya strategi pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya belum efektif dilaksanakan. Meskipun setiap tahunnya jumlah kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan tetapi jumlah kemiskinan tersebut masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Di Indonesia tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di pedesaan sebanyak 15,15 juta jiwa sedangkan untuk tingkat

kemiskinan di kota sebesar 9,99 juta jiwa. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti alokasi dana desa, dana desa, dan rencana belanja modal. Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Ini untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sebagai kontak langsung pemerintah dengan masyarakat, desa menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan, karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak di pedesaan. Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini bermaksud untuk menjadikan Desa yang lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, oleh karena itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan.

Dana Desa juga merupakan sumber dana APBN yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan pedesaan. Dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mendorong pembangunan ekonomi, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat desa sebagai tema pembangunan (Nita Hasibuan, 2017). Sasaran kebijakan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang berkeadilan dengan meningkatkan pelayanan publik pedesaan, mendorong perekonomian pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar pedesaan, dan memperkuat masyarakat pedesaan sebagai tema pembangunan (Baharudin, 2017)

Penyediaan dana desa tahun 2015 adalah Rp. 20,67 triliun, penyalurannya berlipat ganda pada 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, lalu Rp pada 2017 dan 2018. 60 triliun, dan 70 triliun rupiah pada 2019. Mekanisme penyaluran dana desa diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 yang mengatur tentang perubahan dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PP Nomor 60 Tahun 2014. Gumilang (2019) menyatakan salah satu tujuan pengalokasian dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun karena dana desa yang digelontorkan besar, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan analisis yang tepat untuk mengurangi kemiskinan. Strategi respons harus berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai kemandirian desa, perlu dilakukan langkah-langkah penyelenggaraan sistem pemerintahan desa yang dapat menata, mengelola, menggali, dan menggerakkan segala potensi yang ada di masyarakat (Gumilang, 2019).

Penggunaan dana desa memperkuat anggapan bahwa dana desa tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama karena mereka tidak dapat menyerap tenaga kerja dari orang miskin dan membeli barang dan jasa dari masyarakat, serta tidak dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Jika dana desa tidak dapat menurunkan angka kemiskinan yang paling banyak menerima dana desa, hal ini dapat dimaklumi, apalagi tidak semua dana atau sangat sedikit dana digunakan

untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, karena pembangunan alam biasanya merupakan barang publik, peningkatan pendanaan untuk pembangunan alam tidak berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan. Memiliki kekayaan sumber daya alam, tempat-tempat strategis penting, kebanyakan orang hidup dari pertanian (Rimawan & Aryani, 2019).

Sudah seharusnya Dana Desa dapat menurunkan kemiskinan, karena pengeluaran pemerintah untuk Dana Desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan pembangunan sosial, jadi sudah seharusnya penggunaan Dana Desa sudah seharusnya dapat menurunkan kemiskinan di daerah, namun penggunaannya juga perlu tepat sasaran dan hanya digunakan untuk kepentingan urusan daerah, khususnya di daerah pedesaan. Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia".

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2015-2019.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Dana desa merupakan anggaran keuangan yang disediakan oleh pemerintah kepada desa. Sumber ADD berasal dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang kebijakan umum dana desa. Menurut undang-undang, pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 10% dari dana yang ditransfer ke daerah, tidak termasuk dana transfer yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota (Baharudin, 2017). Penyaluran dana desa memegang peranan penting dan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan otonomi pedesaan (Pratiwi & Ulfah, 2018).

Berdasarkan Buku Pintar Dana Desa (2017), Saat ini masih ada anggaran Kementerian / Lembaga (K / L) berbasis desa yang mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K / L tahun 2017. Dana ini kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pendanaan dana pedesaan agar pembangunan pedesaan lebih ideal. Dana desa adalah dana APBN yang dialokasikan kepada desa yang disalurkan melalui APBD daerah / kota dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan; serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa di Indonesia dan dialokasikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut: jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis agar pembangunan lebih ideal.

2.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah standar hidup yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi sejumlah atau sekelompok orang dibandingkan dengan standar hidup masyarakat yang bersangkutan. Standar hidup yang rendah tersebut secara langsung berdampak pada kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang dianggap miskin (Sri et al., 2010). Kemiskinan terjadi karena perbedaan sumber daya dan indikator pembangunan manusia yang rendah (Susilowati, 2017)

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian memperburuk ketimpangan. Kemampuan kerja masyarakat miskin biasanya lemah dan memiliki kesempatan terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mereka tertinggal oleh masyarakat lain yang berpotensi lebih besar (Rimawan & Aryani, 2019). Menurut penelitian Nurwati, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah yang beraneka ragam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan sosial. Jika didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan anggaran pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan mulus (Nurwati, 2008). Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengukur keterkaitan antara kebijakan fiskal sebagai salah satu langkah penanggulangan kemiskinan (Rusdarti & Sebayang, n.d.). Kemiskinan sendiri dibagi menjadi tiga yaitu: a) Kemiskinan Absolut, b) Kemiskinan Relatif, c) Kemiskinan Kultural, d) Kemiskinan Struktural.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjelaskan remunerasi dari faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, artinya faktor produksi di setiap daerah berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang juga diartikan sebagai peningkatan output per kapita (Afrilianto, 2017). Menurut Prasetyo dan Eko, Model pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan model ekonomi yang menitikberatkan pada pemacu pertumbuhan pendapatan masyarakat melalui percepatan sektor ekonomi yang efektif dan dinamis, tanpa memperhitungkan dampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti menipisnya sumber daya alam. Hancurkan sumber daya dan lingkungan (Prasentyanto & Eko, 2012). Untuk itu perlu disusun rencana pembangunan yang tepat dan memperhatikan kemampuan lingkungan. Tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan tidak adanya tambahan lapangan kerja akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan tambahan (ayam kecil) yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan (Aghnia, 2018).

2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin untuk mendapatkan

pekerjaan, dan orang yang mempunyai pekerjaan tapi belum memulai bekerja (BPS, n.d.). Pengangguran dapat terjadi dikarenakan oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengertian pengangguran mengalami penyesuaian dan perluasan. Pengangguran mengacu pada mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang berbisnis, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mampu mendapatkan pekerjaan (sebelumnya diklasifikasikan sebagai tidak memiliki tenaga kerja), dan yang telah mendapatkan pekerjaan Tetapi orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Mulai bekerja (sebelumnya tergolong bekerja), tetapi pada saat yang sama mereka tidak bekerja (menganggur). Pengangguran dengan konsep atau definisi ini biasa disebut pengangguran terbuka.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

UNDP percaya bahwa Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses memperluas pilihan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia diusulkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan secara teratur diterbitkan dalam Laporan Pembangunan Manusia tahunan (UNDP, 1990). Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin tinggi pula kualitas pendidikannya. Kesehatan dan daya beli wilayah meningkat. Harapannya dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan maka tenaga kerja semakin produktif yang dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan (Manggala, 2019). Perkembangan IPM di Indonesia secara keseluruhan terus berkembang, akibat adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM selama periode ini. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan jumlah bagian Indeks Pembangunan Manusia, yaitu angka harapan hidup, rata-rata angka melek huruf selama tahun ajaran, dan pengeluaran riil per kapita. Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM pada periode tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

Uji Chow

Pertama-tama data panel diestimasi menggunakan efek spesifikasi *fixed*. Uji yang dilakukan yaitu *Uji Chow*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*.

TABEL 4.1

HASIL TES REDUNDANT FIXED EFFECT-LIKELIHOOD RATIO

Effects Test	Statistik	d.f	Prob
Cross Section F	349.812702	(32,128)	0.0000

Cross Section Chi square	739.608098	32	0.0000
--------------------------	------------	----	--------

Sumber: Uji Chow dengan software eviews 9.

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas *Chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga menyebabkan H_0 ditolak. Maka model *fixed Effect* adalah model yang sebaiknya digunakan.

a. Correlated Random Effect-Hausmann

Test Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan dari *fixed effect*.

TABEL 4.2

HASIL TES UJI HAUSMAN

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-sq	d.f	Prob.
Cross-section random	26.190151	4		0.0000

Sumber: Uji Hausman dengan software eviews9 (diolah).

Hasil probabilitas *chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan *fixed effect*.

Pemilihan model terbaik dalam metode analisis data panel dilakukan dengan melakukan pengujian statistik melalui *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow test* digunakan untuk memilih model terbaik antara model *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil pengujian *Chow test*, nilai probabilitasnya adalah 0.0000, artinya model terbaik yang dipilih antara PLS dan FEM adalah *Fixed Effect Model* karena nilai probabilitas dari *Chi-Square* kurang dari taraf nyata 5%. Pengujian selanjutnya adalah untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* dengan menggunakan Hausman Test. Berdasarkan hasil pengujian *Hausman test*, nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.0000, artinya model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* karena nilai probabilitasnya kurang dari taraf nyata 5%.

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0.101075 menunjukkan bahwa $prob > 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat masalah normalitas dan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikorelasi

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas $> 0,8$ maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinieritas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi $< 0,8$ maka model bebas dari masalah

Dari hasil uji yang dilakukan, semua koefisien korelasi

$< 0,8$. Maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari masalah *multikolinieritas*.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut adalah tabel hasil Uji *Heterokedastisitas* menggunakan Uji *White*.

Hasil regresi dari uji *white* terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas *chi square* lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*.

Dari hasil uji *DW* yang telah dilakukan, didapatkan hasil *Durbin-Watson* stat sebesar 1.359, sedangkan $dL = 1,696$ dan $du = 1,795$. Pada taraf nyata 0.05 dengan jumlah observasi (n) sebanyak 165 dan jumlah variabel bebas (k) = 4, maka selang *DW* statistik untuk dapat terima $DW < dL$. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil *DW* sebesar 1.359122. Karena nilai d lebih kecil dari dL maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi positif. Tetapi karena dalam mengestimasi model digunakan pembobotan dengan metode *GLS (Generalised Least Square)*, yaitu dengan mentransformasi model sedemikian rupa sehingga memenuhi asumsi *Gauss-Markov* untuk mendapatkan komponen sisaan yang homogen (*homoskedastisitas*) dan tidak menunjukkan autokorelasi (Juanda, 2009), maka masalah autokorelasi dalam model ini dapat diabaikan dan dianggap telah teratasi.

3.2 Analisis Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan efek tetap (*fixed effect*). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Dari hasil Tabel 4.4 di atas di ketahui probabilitas semua variabel yaitu X_1 (Dana Desa), X_2 (Pertumbuhan Ekonomi), X_3 (TPT), dan X_4 (IPM) signifikan dalam taraf error 5%.

3.3 Hasil Uji Signifikansi

A. Uji Keseluruhan (uji-f)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Eviews 9, diperoleh nilai *F*-hitung sebesar 539.4225 dan probabilitas *F* sebesar 0,000. Dalam taraf signifikansi 95% dan toleransi 5% maka uji *F* signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Dana Desa, Pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tingkat kemiskinan di Indonesia.

B. Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing

variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel.

1. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki probabilitas sebesar 0.000. Dalam tingkat signifikan 95% dan toleransi 5%, maka probabilitas lebih kecil dari 5% ($0.000 < 0.05$) sehingga variabel Dana Desa secara individu signifikan dalam mempengaruhi penduduk miskin di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar -4.77 menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut berarti apabila terjadi peningkatan dana desa Rp.1 Miliar akan diikuti penurunan tingkat kemiskinan sebesar 4,77%, atau 4.77 ribu penduduk miskin di Indonesia.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas sebesar 0.0486 dalam taraf signifikan 95% dan toleransi 5%, maka probabilitas lebih kecil dari 5% ($0.0486 < 0.05$) sehingga variabel pertumbuhan ekonomi secara individu signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 0.034 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut berarti apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% akan menyebabkan peningkatan 0.0344% tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki probabilitas sebesar 0.0020 dalam taraf signifikan 95% dan toleransi 5%. Maka probabilitas lebih kecil dari 5% ($0.002 < 0.05$). sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 0.222 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut terjadi jika kenaikan tingkat pengangguran terbuka 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebanyak 0.22% tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia probabilitas sebesar 0.0034 dalam taraf signifikan 95% dan toleransi 5%. Maka probabilitas lebih kecil dari 5% ($0.003 < 0.05$) sehingga variabel Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar -0.094 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut berarti apabila terjadi peningkatan IPM 1 indeks akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.09%. hal tersebut bahwa semakin tinggi IPM maka semakin turun tingkat kemiskinan.

TABEL 3.1

HASIL UJI T PADA MODEL *FIXED EFFECT*

Variabel	t-statistik	t-tabel	Probabilitas	α
DD	-6.8818114	1.65426	0.0000	0.05
Growth	1.990940	1.65426	0.0486	0.05
TPT	3.154574	1.65426	0.0020	0.05
IPM	-2.982460	1.65426	0.0034	0.05

Sumber: hasil analisis dengan menggunakan program *eviews 9 (diolah)*

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan (1). Hasil perhitungan pada tabel menunjukkan nilai $R^2 = 0.993$ dengan demikian dapat diartikan bahwa total tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 99% sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi data panel dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 bahwa dana desa, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi masih belum dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia hal tersebut dikarenakan Tanda positif dari koefisien pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Alasannya mungkin karena satu-satunya penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi adalah kelompok berpenghasilan tinggi, sedangkan kelompok berpenghasilan menengah dan rendah belum terpengaruh. Tingginya ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh si kaya, membuat ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin di Indonesia semakin jauh. Persoalannya bukan hanya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana ekonomi itu terdistribusi dan berkeadilan, sehingga hasil pertumbuhan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Dana desa sudah memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia walaupun hasil

nya belum terlalu signifikan hal tersebut terjadi karena dana desa belum berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di beberapa daerah kabupaten/kota. Hal ini dapat disebabkan pengelolaan dana desa belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan selain itu, dana desa masih berfokus terhadap pembangunan infrastruktur desa bukan pada program pemberdayaan ekonomi yang berfokus kepada pengentasan kemiskinan masyarakat desa.

Dana desa yang diberikan mencapai hasil positif dalam pengentasan kemiskinan selama lima tahun terakhir di berbagai desa di Indonesia, banyak desa yang berhasil menunjukkan bahwa dana desa berhasil secara efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2015 hingga 2019 tidak terjadi perubahan yang signifikan antar kuadran. Tingkat persentase kemiskinan juga mengalami penurunan di tiap tahunnya yang didukung dengan semakin meningkatnya jumlah anggaran dana desa yang dialokasikan di tiap desa di tiap provinsi.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dari penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal yaitu, Pemerintah harus lebih mendukung pemberdayaan masyarakat di desa guna membangun ekonomi desa maka hal tersebut perlu dilakukan pendampingan, pelatihan dan pengawasan yang intensif. Oleh karena itu perbaikan kapasitas perangkat desa sekaligus peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Selain itu juga perlu ditingkatkan UMKM desa dengan cara peningkatan akses terhadap distribusi yaitu jalan dan modal transportasi sekaligus dapat meningkatkan akses terhadap produk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrilianto, anugerah gusti. (2017). *Analisis dampak alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten bogor*.
- [2] Aghnia, N. L. (2018). *PENGARUH DANA DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA*.
- [3] Baharudin, A. (2017). *Warta Fiskal Dana Desa (III)*. Badan Kebijakan Fiskal- Kementerian keuangan RI.
- [4] BPS. (n.d.). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT> (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah, kurang dari 35 jam

- seminggu).
- [5] Gumilang, muhammad fajar. (2019). *Analisis dampak alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten bogor*.
- [6] Harning, S. V., & Amri. (2016). *DANA DESA DAN KEPADATAN BELANJA DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH*. 1, 254–261.
- [7] Manggala, G. D. (2019). *PENGARUH DANA DESA (DD) DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT*. 1 (November), 1–7.
- [8] Nita Hasibuan, S. (2017). *Kesiapan Masyarakat Perdesaan Dalam Mengelola dana Desa*.
- [9] Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. 10(1), 1–11.
- [10] Prasentyanto, P., & Eko. (2012). *Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap perekonomian Daerah*.
- [11] Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 429–440. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- [12] Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). *Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskian pada Kabupaten Bima*. 374–379.
- [13] Rusdarti, & Sebayang, L. K. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 1–9.
- [14] Sri, M., Suliswanto, W., Magister, M., Ekonomi, I., & Brawijaya, U. (2010). *DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)*.
- [15] Susilowati, N. I. (2017). No Title. *Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Vol 1 Jili*, 189 – 202.
- [16] UNDP. (1990). Human Development Report 1990. Concept and Measurement of Human Development. In *United Nations Development Programme*. <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990>
- [17] Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2013). *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*. 1999, 546–560.